

FAKTOR PENDORONG BHUTAN MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL TAHUN 2020

Andi Purwono, Niswatul Harisa

Email: andipurwono75@gmail.com, n.harisaa212@gmail.com

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Abstract

This research aims to find out the reasons that prompted Bhutan to open diplomatic relations with Israel in 2020. This study was written using a qualitative approach, through library research techniques such as books, official state documents, news and other mass media. This study uses the theory of national interest to determine the goals and interests of Bhutan. In this study, two reasons were found that pushed Bhutan to open diplomatic relations with Israel in 2020, namely the existence of Bhutan's national interests in the economic and military security fields.

Keywords : *Diplomatic Relations, Economic Interest, Military Security, National Interest*

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mendorong Bhutan dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatic dengan Israel tahun 2020. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, dokumen resmi negara, berita dan media massa lainnya. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional yang bersifat materiil. Penelitian ini menemukan dua alasan yang mendorong Bhutan dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020 yaitu adanya kepentingan nasional negara Bhutan dalam bidang ekonomi dan keamanan militer.

Kata kunci : *Hubungan Diplomatik, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Militer, Keamanan Nasional*

A. PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Pengetahuan dan teknologi yang semakin maju mendorong negara negara untuk melakukan suatu kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan dan keinginan dalam meningkatkan hubungan yang lebih baik antar negara. Pembukaan hubungan diplomatik bertujuan untuk menjalin hubungan persahabatan dan dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dibidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan

iptek dan diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan nyata.

Bhutan adalah negara berbentuk kerajaan yang terkurung daratan (landlock country) di lereng selatan Himalaya Timur dengan luas daratan sekitar 38.394 km². Bhutan berbatasan dengan daerah otonomi Tibet Cina di bagian utara dan dengan India di bagian barat, selatan dan timur. Bhutan adalah negara berpenduduk paling sedikit di Asia Selatan dengan 873.700 populasi penduduk. Wilayah Bhutan dilestarikan sebagai hutan selamanya sebesar 60 persen. Bhutan adalah salah satu negara dengan urbanisasi paling sedikit di dunia, dengan hanya 21% dari total penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Namun, diperkirakan hampir setengah dari populasi akan tinggal di pusat kota pada tahun 2020 jika tren migrasi desa-kota saat ini terus berlanjut (Uddin,2009).

Bhutan telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat selama tiga dekade terakhir, dan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan telah menurun lebih dari 50 persen antara tahun 2007 hingga 2021. Sektor pertanian adalah kontributor utama ekonomi nasional yang mempekerjakan 55,78 persen dari populasi negara Bhutan. Kontribusinya terhadap PDB telah meningkat dari 14,78 persen pada 2010 menjadi 19,23 persen pada tahun 2020.

Produksi pertanian Bhutan menghadapi banyak tantangan, termasuk perubahan iklim, bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, konflik manusia dan satwa liar, kelangkaan air, kekurangan tenaga kerja, manajemen pasca panen yang terbatas dan hambatan akses pasar. Selain itu, kurangnya akses ke teknologi dan tidak adanya lingkungan yang memungkinkan untuk investasi sektor swasta, layanan pengembangan bisnis, pasar yang adil, dan kredit yang terjangkau menjadikan kendala utama pada pengembangan agro-perusahaan pedesaan. Ketergantungan sosial-ekonomi Bhutan pada pertanian, sumber daya air dan hutan, menyebabkan Bhutan menanggapi dengan serius masalah dari dampak perubahan iklim yang terbukti dapat menjadi ancaman serius bagi upaya pembangunan Bhutan.

Bhutan menghadapi berbagai masalah sosial yang menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah. Bhutan membutuhkan dana yang besar untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan.

Dampak perubahan iklim yang semakin besar mengakibatkan Bhutan berada dalam ancaman pembangunan sektor pembangkit listrik yang menjadi kontributor utama perekonomian negara serta promosi pariwisata yang juga ikut meningkatkan pendapatan negara. Untuk memperbaiki situasi, Bhutan membutuhkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang kuat. Akibat tantangan sosial ekonomi yang ada, negara yang terkenal dengan fokus pembangunan yang berlandaskan pada GNH rakyatnya ini menduduki peringkat rendah dalam World Happiness Report 2019. Selain itu, Bhutan juga merupakan negara yang tertinggal dalam bidang teknologi.

Bhutan menjadi anggota PBB pada 1971 dan memiliki hubungan diplomatik dengan sekitar 50 negara, termasuk Indonesia. Namun Bhutan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara besar yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia. Sementara Israel memiliki hubungan resmi dengan sekitar 160 negara, namun tak punya hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab dan sejumlah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 2020 Bhutan membuka hubungan diplomatik dengan Israel (Kawilarang, R.,2020).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai kepentingan Bhutan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020. Maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Mengapa Bhutan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020?”

Penulis menggunakan teori klasik dalam hubungan internasional yaitu kepentingan nasional. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi alasan Bhutan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020. Kepentingan nasional merupakan konsep utama dalam hubungan internasional.

Kebijakan luar negeri negara senantiasa dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan negara selalu bekerja untuk mengamankan tujuan kepentingan nasionalnya tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah *the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy* (Plano, J.C & Roy Olton, 1967).

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para

pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebuah negara sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.

Plano dan Olton juga menyebutkan idenya tentang kepentingan nasional menjadi 5 elemen penting dalam kepentingan nasional : (1) Pertahanan diri (self preservations), (2) Kemandirian (independence), (3) Integritas territorial (territorial integrity), (4) Keamanan militer (military security), (5) Kemakmuran ekonomi (economic well- being).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan permasalahan yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian (Bakry,2016).

Penelitian ini akan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam mengenai penyebab atau alasan negara Bhutan membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020.

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan jenis data sekunder yang mendukung proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari literatur buku, jurnal, internet, berita atau surat kabar dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan yang mendorong Bhutan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020 adalah karena adanya kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan militer yang hendak dicapai oleh negara Bhutan. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan tersebut, dibawah ini penullis akan memaparkan variabel-variabel penyebabnya.

A. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi yang mendorong Bhutan melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel adalah sektor manajemen air, pertanian, teknologi, Pendidikan, dan pelatihan professional. Bhutan merupakan sebuah negara yang wilayahnya dikelilingi pegunungan dan sungai. Hal tersebut menjadikan negara Bhutan kaya akan sumber daya air. Kekayaan sumber daya air yang ada di Bhutan menjadikan pemerintah Bhutan memutuskan untuk mengeksploitasi potensi sumber daya air yang dimiliki untuk pembangkit listrik tenaga air.

A.1 Manajemen Sumber Daya Air

Pembangkit listrik tenaga air merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian negara Bhutan. Namun, kurangnya pemahaman tentang manajemen tenaga air yang dimiliki Bhutan menyebabkan potensi yang dimiliki tidak digunakan secara maksimal. Hal tersebut mendorong Bhutan dalam pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu dimaksudkan agar memperoleh bantuan terkait pemahaman mengenai manajemen air sehingga Bhutan dapat memanfaatkan potensi tenaga air yang dimiliki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pernyataan Ron Malka selaku duta besar Israel untuk India bahwa Israel telah memberikan advis kepada Bhutan terkait manajemen air, pertanian, teknologi, Pendidikan, dan pelatihan professional (Kuenselonline.com,2020). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepentingan ekonomi Bhutan dalam manajemen potensi tenaga air yang dimiliki agar dapat dimaksimalkan guna meningkatkan perekonomian negara Bhutan.

Bhutan memiliki sumber daya air yang melimpah dan akan menghadapi tantangan baru yang kompleks dan meluas yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan sosial ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut harus ditangani secara efektif melalui kebijakan, tindakan, peraturan, pendidikan publik, partisipasi pemangku kepentingan dan program pembangunan yang dirancang dengan baik

dengan lembaga manajemen yang efisien. Kebijakan air menetapkan visi Pemerintah sebagai berikut : Air adalah sumber daya alam, ekonomi dan kehidupan yang paling penting dan kita harus memastikan bahwa itu tersedia dalam jumlah yang melimpah untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Generasi sekarang dan mendatang akan memiliki akses yang terjamin terhadap air yang memadai, aman dan terjangkau untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup mereka dan integritas ekosistem alami. Visi Air didasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya air terpadu, penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan, efisiensi ekonomi, pemerataan dan tata kelola yang baik. Bhutan memprioritaskan penggunaan air yang dimiliki untuk keperluan domestik, pertanian, tenaga air, dan industry.

Permintaan listrik Bhutan pada tahun 2003 adalah 105 MW, 664 GWh dan 99,5% listrik dipasok dari sumber daya tenaga air. Sekitar 40% dari populasi Bhutan (di 40 kota dan 822 desa) memiliki akses listrik. Ada 45.743 konsumen listrik. Surplus generasi dari pembangkit listrik tenaga air diekspor ke India dan mengambil sejumlah besar pendapatan yang membantu memenuhi defisit anggaran. Sekitar 300 MW listrik dan 70% dari total pembangkit listrik tenaga air diekspor ke India pada tahun 2003 (https://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/op/hydro_tsheringbhutan.pdf).

Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan yang strategis untuk Bhutan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dan telah menjadi fundamental dalam meningkatkan standar hidup masyarakat, dan merupakan tulang punggung ekonomi Bhutan. Pentingnya strategis tenaga air diabadikan dalam Konstitusi Kerajaan Bhutan. Dalam pidato Hari Nasional pada 17 Desember 2013, raja Bhutan menyatakan bahwa PLTA dianggap sebagai sumber daya paling berharga milik bangsa yang dimiliki oleh semua orang Bhutan. Sumber daya tenaga air secara berkelanjutan dimanfaatkan oleh negara

untuk menyediakan energi yang andal, memadai, aman dan terjangkau bagi semua orang Bhutan, sambil menjajaki peluang ekspor untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan tersebut menyelaraskan model pengembangan tenaga air sehingga tidak hanya memaksimalkan manfaat bagi negara tetapi juga memastikan bahwa manfaat ini diperoleh secara adil bagi masyarakat Bhutan (<https://www.moea.gov.bt/wp-content/uploads/2017/07/Sustainable-Hydropower-Development-Policy-2021.pdf>).

Tenaga air, sebagai sumber daya terbarukan yang bersih, memiliki dua peran penting untuk dimainkan dalam pembangunan sosial-ekonomi Bhutan: (1) Untuk menyediakan listrik yang aman, andal, cukup dan terjangkau untuk konsumsi domestik dan penggunaan industri. (2) Sebagai industri untuk mendapatkan pendapatan dari ekspor hidroelectricity sehingga memberikan modal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan mencapai kemandirian ekonomi.

Dalam rancangan kebijakan air, Bhutan telah mempertimbangkan situasi yang mungkin timbul ketika sumber daya air tidak cukup baik dalam kuantitas dan kualitas untuk memenuhi setiap permintaan yang sah dan terutama permintaan biologis untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Dalam situasi seperti itu, sesuai rancangan kebijakan, air untuk minum dan sanitasi harus menjadi pertimbangan utama. Air untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, penggunaan industri dan rekreasi diusulkan untuk dipertimbangkan berdasarkan prioritas nasional dan local serta disarankan agar undang-undang air dan praktik manajemen memungkinkan fleksibilitas untuk mengadopsi solusi lokal praktis. Sementara pembangunan PLTA melibatkan penggunaan air yang tidak konsumtif, pengalihan dan pembenahannya dapat menyebabkan dampak sosial lingkungan yang tidak diinginkan yang harus dipertimbangkan dalam tahap perencanaan awal pembangunan untuk menghindari konflik dan penundaan implementasi di masa depan.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang dirumuskan pada tahun 2003 memberikan penilaian umum sumber daya air di negara ini dan

membahas skenario penawaran dan permintaan saat ini dan masa depan. Masalah terkait air termasuk konflik penggunaan air disorot dan dibuat sadar dalam Rencana. Proyek air terpadu juga diidentifikasi untuk kemungkinan pengembangan dan demonstrasi berkelanjutan.

A.2 Pertanian

Bidang lain yang mendorong pembukaan hubungan diplomatik Bhutan dan Israel adalah sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan rilis yang dipaparkan pejabat kedua Negara dalam penandatanganan kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik pada tanggal 12 Desember 2020 bahwa Israel telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Bhutan sejak 1982, terutama di bidang pengembangan pertanian yang telah memberi manfaat bagi ratusan pemuda Bhutan.

Pertanian di Bhutan memiliki peran dominan dalam perekonomian negara. Sekitar 80% penduduk Bhutan terlibat dalam pertanian dan lebih dari 95% wanita berpenghasilan di negara ini bekerja di sektor pertanian. Tanaman pokok utama di Bhutan adalah padi. Pertanian di negara ini juga mencakup budidaya jagung, gandum dan tanaman sereal kecil lainnya (<https://www.grida.no/resources/1733>).

Pertanian berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi Bhutan dengan menyumbang 33% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 69% populasi. Namun hampir sepertiga penduduk Bhutan menderita kerawanan pangan. Pengeluaran makanan mewakili 40% dari total pengeluaran rata-rata orang di Bhutan. Karena itu, penting bagi pemerintah Bhutan untuk memastikan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pertanian dan ketahanan pangan.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 110% dalam hasil beras akan membantu Bhutan mencapai swasembada pangan. Petani akan mendapatkan 1,3 miliar Ngultrum (Nu) dan biaya produksi mereka akan turun, namun harga yang diperoleh tetap ditentukan oleh harga dunia. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan fiskal (<https://sites.google.com/site/thekingdomofbhutan/agriculture>).

Sebanyak 64 persen dari luas daratan di Bhutan ditutupi oleh pohon, 6,6 persen oleh padang rumput alpine / padang rumput dan semak belukar, 8,8 persen oleh pertanian, 10 persen oleh salju dan gletser dan 10,6 persen oleh batuan terbuka, padang rumput, air, dll. Pertanian komersial telah mulai muncul selama 20 tahun terakhir. Beberapa petani memasarkan surplus produksi mereka. Peningkatan produktivitas telah dicapai dengan memperkenalkan tanaman tunai seperti kentang, cabai, kapulaga, jeruk, apel dan sayuran. Selain itu, input modern seperti peningkatan benih dan pupuk sedang diperkenalkan. Upaya pembangunan selama 20 tahun terakhir telah berkontribusi pada fasilitas irigasi dan layanan penyuluhan yang lebih baik kepada petani dan perbaikan mesin pertanian, mekanisasi progresif, dan adopsi praktik konservasi.

Ada 3 jenis budidaya pertanian subsisten yaitu : (1) Budidaya lembah, di daerah dengan kemiringan kurang dari 30%, berada di tanah yang biasanya bertingkat dan diairi (lahan basah atau chushing). Jenis lahan ini mewakili 18% dari total lahan budidaya, dan biasanya digunakan untuk menanam padi. (2) Budidaya bertingkat berada di lahan tadah hujan (juga disebut sebagai lahan kering atau kamshing) dengan kemiringan lebih dari 30%. Jagung adalah tanaman musim panas utama, diikuti oleh soba di daerah yang tidak cocok untuk jagung karena musim panas yang dingin. Gandum, barley, mustard, kacang-kacangan, soba dan kentang. (3) Pergeseran budidaya (tsheri), subjek penelitian ini, yang dipraktikkan pada 32% dari lahan budidaya. Pergeseran budidaya dipraktikkan untuk melindungi risiko kegagalan panen dan untuk mengkompensasi defisit pangan, dan hampir semua petani yang mempraktikkannya dapat dianggap sebagai petani subsisten (<https://www.fao.org/3/V8380E/V8380E03.htm#TopOfPage>).

Meskipun lebih dari 60% penduduk Bhutan bekerja di bidang pertanian, negara ini masih bergantung pada impor untuk sekitar 50% dari makanannya. Hal tersebut dikarenakan jumlah tanah subur yang digunakan

untuk pertanian hanya ada 2,6%. Adanya perubahan iklim dan bencana alam yangn terjadi seperti banjir, kebakaran hujan, dan gempa bumi juga turut menjadi faktor ancaman bagi sektor pertanian di Bhutan.

Untuk mengatasi masalah sistemik dalam sistem pangan Bhutan, Program Pangan Dunia (WFP) menginvestasikan US \$ 7 juta untuk mendukung Pemerintah Kerajaan Bhutan dalam meningkatkan pertanian yang tahan iklim dengan 6 pendekatan yaitu : (1) Meningkatkan permintaan untuk produk yang ditanam secara lokal. (2) Meningkatkan produksi untuk petani kecil. (3) Meningkatkan manajemen pasca panen. (4) Meningkatkan ketahanan iklim. (5) Menghilangkan hambatan gender antara petani laki-laki dan petani perempuan. (6) Edukasi tentang Kesehatan (<https://reliefweb.int/report/bhutan/6-ways-bhutan-building-better-food-systems-farm-table>).

B. Kepentingan Keamanan Militer

Kepentingan keamanan yang mendorong Bhutan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel adalah teknologi pengembangan sektor keamanan siber nasional yang ingin dikembangkan negara Bhutan dan penjagaan wilayah dari ancaman negara tetangga.

B.1 Teknologi Pengembangan Sektor Keamanan Siber Nasional

Sebagai negara yang baru mulai memasuki era digital, Bhutan masih memerlukan bantuan dari negara dengan tingkat teknologi yang lebih unggul dibandingkan Bhutan. Adanya keinginan untuk mengembangkan keamanan siber nasional Bhutan yang membutuhkan sumber dana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi mendorong Bhutan melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel th 2020.

Pernyataan Ron Malka bahwa pemerintah Bhutan menganggap Israel sebagai negara yang maju di bidang teknologi dan inovasi yang bisa membantu Bhutan menjadi negara maju dan menggunakan lebih banyak teknologi canggih (<https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish->

[diplomatic-ties/](#)). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara Bhutan memiliki kepentingan keamanan.

Kerajaan Bhutan sedang mengalami perubahan besar dalam hal infrastruktur teknologi (digitalisasi). Pada era digitalisasi ini menempatkan Bhutan pada risiko eksploitasi dunia maya. Ini lebih berisiko dengan tidak banyak yang menyadari kejahatan dunia maya. Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa manfaat yang besar dalam hal kecepatan dan efisiensi transformasi digital, itu juga dapat secara signifikan memperluas lanskap risiko keamanan siber atau "permukaan serangan". Hal tersebut menjadi faktor penyebab perlunya pemerintah membingkai infrastruktur yang mendukung TIK dalam Strategi Keamanan Siber Nasional (NCS) komprehensif yang

dikembangkan melalui pendekatan yang koheren dan mencakup semua secara nasional (The UN specialized agency for ICTs,2020).

Untuk menciptakan kesadaran akan isu penting ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) bekerja sama dengan International Telecommunication Unit (ITU) mengadakan lokakarya untuk meningkatkan keamanan Siber dan mengembangkan strategi keamanan siber Nasional pertama di tanah air. Keamanan siber didefinisikan sebagai perlindungan komputer, jaringan, program, dan data dari akses tidak sah atau serangan yang ditujukan untuk eksploitasi.

Untuk memastikan pendekatan tingkat tinggi terhadap keamanan cyber, fasilitator Dr. Marco Gercke, direktur Cybercrime Research Institute melakukan latihan simulasi insiden keamanan cyber selama lebih dari dua jam. Dia mengatakan latihan itu bukan untuk menakut-nakuti siapa pun atau membuat siapa pun di bawah tekanan, idenya murni 'peningkatan kesadaran'.

Menteri Kemdikbud Karma Donnen Wangdi mengatakan bahwa latihan simulasi mungkin tidak sepenuhnya mencegah sistem dari serangan dunia maya tetapi akan memberikan tingkat panduan tertentu.

Selain itu, ini akan memberikan pemahaman yang baik tentang apa yang mungkin terjadi pada negara jika serangan seperti itu terjadi.

Sejak diperkenalkannya internet di Bhutan pada tahun 1999, internet telah berkembang dari platform pertukaran informasi menjadi tulang punggung bisnis modern, infrastruktur dan jaringan sosial. Saat ini, banyak pemerintah bertransaksi online dan internet mengubah cara kita bersosialisasi dan berbisnis. Ketergantungan masyarakat kita pada infrastruktur digital tumbuh, di mana ruang siber tetap dihormati. Pada saat yang sama, metode yang digunakan oleh aktor jahat berkembang pesat dan Bhutan tidak terkecuali untuk serangan semacam itu. “Tantangan yang dihadapi Bhutan saat ini adalah kurangnya keterampilan, pengetahuan dan pengalaman di antara para profesional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan di bidang keamanan siber,” kata Lyonpo Karma Donnen Wangdi, MoIC.

Serangan siber menduduki peringkat sebagai salah satu ancaman terbesar yang dihadapi dunia bisnis saat ini. Serangan pada pemrosesan komputer atau jaringan komunikasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 50 miliar hingga 120 miliar dolar. Saat ini, Bhutan memiliki Bhutan Computer Incident Response Team (BtCIRT), yang dikembangkan pada tahun 2016 yang telah menangani lebih dari 250 insiden tetapi belum mengembangkan kebijakan yang holistik dan komprehensif. Stimulasi adalah cara yang baik untuk membuat sensasi pemerintah, eksekutif dan pengguna internet. Kementerian juga berencana untuk melakukan latihan serupa untuk anggota lainnya segera(<http://www.bhutantoday.bt/bhutan-to-have-a-cyber-security-strategy/>).

B.2 Penjagaan Wilayah dari Ancaman Negara Tetangga

Selain keamanan siber nasional, Bhutan juga masih dalam ancaman keamanan yang timbul dari negara tetangga. Ada 3 isu keamanan lintas sektoral yang dihadapi Bhutan yaitu a) konflik perbatasan Sino-Bhutan, implikasi keamanannya, dan bagaimana penyelesaian masalah perbatasan akan semakin memperumit keamanannya , b) kemungkinan perubahan

dalam hubungan Indo-Bhutan karena kekuatan lain seperti pemberontak timur laut India, meningkatkan hubungan Sino-Bhutan dan implikasinya terhadap masalah keamanan India, dan c) sisi gelap globalisasi, dampak Bhutan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pengenalan TV satelit dan teknologi informasi yang mengubah struktur di mana identitas nasional Bhutan tertulis besar. Ketiga masalah di atas akan berdampak besar pada keamanan Bhutan dalam beberapa dekade mendatang (Penjore, *Journal of Bhutan Studies*)

Ketika ancaman Cina tumbuh, India menjadi semakin terlibat dalam pembangunan kemampuan pertahanan asli Bhutan, khususnya dalam pelatihan dan perlengkapan Tentara Kerajaan Bhutan. Markas besar Tim Pelatihan Militer India (IMTRAT) di Bhutan terletak di Distrik Ha, yang berbatasan dengan Lembah Chumbi Tibet, di mana Tiongkok secara rutin mempertahankan konsentrasi pasukan yang besar, di persimpangan perbatasan Bhutan, India, dan Tiongkok.

Perjanjian Indo-Bhutan 1949 tidak mengacu pada pembelaan India atas Bhutan kecuali apa yang dapat disimpulkan dari Pasal 2 perjanjian tersebut. Perdana Menteri Nehru, bagaimanapun, menyatakan pada tahun 1958 bahwa tindakan agresi terhadap Bhutan akan dianggap sebagai tindakan agresi terhadap India sendiri. Menurut ketentuan perjanjian 1949, Bhutan memiliki hak untuk mengimpor senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya dari atau melalui India selama pemerintah India yakin bahwa impor semacam itu tidak mengancam India. Kementerian Pertahanan India juga membuat ketentuan untuk pengerahan cepat pasukan yang dibawa dengan helikopter ke Bhutan jika terjadi invasi China dan membuat rencana terkait untuk operasi angkatan udara. Saran dari dalam pemerintah Bhutan untuk mengizinkan pasukan India ditempatkan di Bhutan ditolak. Pertimbangan defensif yang penting adalah pembangunan jalan yang luas dengan bantuan besar dari Organisasi Jalan Perbatasan paramiliter pemerintah India (<http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-1516.html>).

Sementara itu, China terus mengklaim dan mempersengketakan

wilayah dengan Bhutan. Saat ini, klaim China berada di Bhutan Tengah, Timur, dan Barat. Mulai tahun 1984, Bhutan bahkan telah memulai negosiasi langsung dengan China untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai dan telah mengadakan 24 putaran pembicaraan dan 10 putaran pertemuan tingkat ahli hingga saat ini. Pada tahun 1996, China bahkan telah menawarkan paket kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Bhutan menolak proposal tersebut dengan mempertimbangkan masalah keamanan India. Dengan kemajuan yang terbatas, baik Cina dan Bhutan menandatangani perjanjian pada tahun 1998 untuk mempertahankan status quo sampai sengketa perbatasan diselesaikan.

Namun terlepas dari kesepakatan tersebut, China telah menggunakan perambahan dan pelanggaran untuk membujuk Bhutan menyelesaikan masalah perbatasan yang belum terselesaikan. Taktik mengintimidasi ini telah meningkat dengan pertikaian Doklam 2017, ketika China mengembangkan infrastruktur militer dan pemukiman di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, China juga mengajukan klaim di Bhutan Barat untuk pertama kalinya dan membangun pos-pos militer dan pemukiman di Bhutan Utara.

Pada tahun 2020, laporan media menyatakan bahwa India telah meminta Bhutan untuk menyelesaikan sengketa teritorialnya yang luar biasa dengan China sehingga masalah Doklam dapat diselesaikan. Ada perbedaan besar antara mencoba menyelesaikan sengketa perbatasan dan membangun hubungan diplomatik. China terus melanggar perjanjian 1998 dan 2012 dan telah berbuat sangat sedikit untuk melawan persepsi ancaman Bhutan.

Kehadiran China yang meningkat di lingkungan tersebut telah memicu dan terus memicu beberapa kecemasan bagi India. Setelah mengungkap banyak investasi China dan diplomasi jebakan utang, India sekarang lebih berkomitmen untuk mencegah hal yang sama di Bhutan. Persaingan tidak hanya untuk kekuasaan dan keamanan, tetapi juga untuk prestise, dan kemungkinan besar persaingan untuk Bhutan ini akan

berdampak luas di seluruh wilayah (<https://www.orfonline.org/research/the-complexity-of-bhutan>).

Selain persengketaan wilayah dengan China, baru-baru ini Bhutan juga mengalami ancaman keamanan yang disebabkan oleh dibukanya dua titik masuk Galephu dan Samdrupjongkhar. India dan China memiliki sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama di negara bagian itu dan merupakan salah satu perbatasan paling militeristik di kawasan itu. Ada kekhawatiran bahwa begitu wisatawan mulai menggunakan rute Samdrupjongkhar ke Trashigang yang dibuka, mungkin ada lebih banyak tekanan untuk menyediakan jalur jalan ke Tawang melalui Bhutan. Realitas demografis Benggala Barat dan Assam dengan populasi yang besar dan berubah-ubah serta masalah politik dapat menjadikan ancaman bagi Bhutan.

Selain membuka Samdrupjongkhar, pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkan pos pemeriksaan dari area 4 km di dalam Samdrupjongkhar ke sekitar 18 km di dalam ke Dewathang. Hal ini menimbulkan masalah lain karena saat ini perbatasan kota-kota seperti Phuentsholing, Samdrupjongkhar dan Gelephu memungkinkan orang asing masuk tanpa perlu izin. Pembukaan Samdrupjongkhar dan memindahkan pos pemeriksaan sejauh 18 km dapat mengubah seluruh 18 km area Dewathang menjadi semacam kota perbatasan tanpa kontrol siapa yang masuk. Hal ini dapat mengakibatkan orang Bhutan membangun rumah dan bangunan dan orang asing, baik legal maupun ilegal, tinggal di sana seperti di Phuentsholing dan yang setelah bertahun-tahun akan menuntut hak tempat tinggal dan tidak dapat diminta untuk pergi (TheBhutanese.bt).

Tabel Kepentingan Nasional Negara Bhutan

Bidang	Bentuk	Bukti
--------	--------	-------

<p>Ekonomi</p>	<p>Manajemen sumber daya air yang dimiliki Bhutan agar dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari sumber daya air yang dimiliki.</p> <p>Pengembangan bidang pertanian dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para wanita agar dapat ikut berkontribusi dalam menggerakkan sektor pertanian di Bhutan.</p>	<p>Pernyataan bersama antara duta besar Bhutan untuk India, Mayor Jenderal Vetsop Namgyel dan duta besar Israel untuk India Dr Ron Malka saat proses menandatangani kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik pada 12 Desember 2020 di kedutaan besar Israel di New Delhi India</p> <p>Sumber:https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish-diplomatic-ties/</p>
<p>Keamanan</p>	<p>Kebutuhan teknologi pengembangan keamanan siber nasional negara Bhutan.</p>	<p>Pernyataan resmi dari duta besar Israel untuk India, Dr Ron Malka dalam siaran pers</p> <p>Sumber:https://www.voaindonesia.com/a/israel-bentuk-hubungan-diplomatik-dengan-bhutan/5697549.html</p>

D. KESIMPULAN

	Penjagaan wilayah dari ancaman negara China dalam kasus sengketa perbatasan Indo-Bhutan.	Berita pembangunan pemukiman China di tanah sengketa Indo-Bhutan yang terus dilakukan China. Sumber: https://www.rctiplus.com/news/detail/global/1896901/tiongkok-gencarkan-pembangunan-dekat-bhutan
--	--	--

Ada dua faktor yang mendorong Bhutan dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020 yaitu kepentingan ekonomi berupa sektor manajemen sumber daya air dan pertanian. Kepentingan kedua Bhutan adalah Keamanan Militer berupa kebutuhan teknologi pengembangan sektor keamanan siber nasional yang ingin dikembangkan negara Bhutan dan penjagaan wilayah dari ancaman Negara tetangga. Itulah faktor- faktor yang mendorong Bhutan melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020.

Riset ini menunjukkan bahwa kepentingan material berpengaruh dalam mendorong kebijakan luar negeri. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan teori konstruktivisme untuk melihat adakah alasan ideasional di balik pembukaan hubungan diplomatik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Uddin, S. N., & Taplin, R. (2009). *Trends in renewable energy strategy development and the role of CDM in Bangladesh*. *Energy Policy*, 37(1), 281-289.
- Bakry, U. S. (2016). *Motode penelitian Kualitatif*.
- Plano, J. C., & Roy O. (1968). *International Relations Dictionary*, USA.
- Tshering, S., & Bharat T. *Hydropower - Key to sustainable, socio-economic development of Bhutan*, diakses dari www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/op/hydro_tsheringbhutan , pada tanggal 5 Maret 2022.
- Penjore, D., *Security of Bhutan: Walking Between the Giants*, *Journal of Bhutan Studies*, 118-123.

National Environment Commission. 2014. *BHUTAN : Bhutan Water Vision and Bhutan Water Policy*. Diakses dari <https://policy.asiapacificenergy.org/node/2896> , pada tanggal 15 Maret 2022.

Ministry of Economic Affairs Royal Government Of Bhutan, *Bhutan Sustainable Hydropower Development Policy 2021*, diakses dari <https://www.moea.gov.bt/wp-content/uploads/2017/07/Sustainable-Hydropower-Development-Policy-2021.pdf> , pada tanggal 6 februari 2022.

Website dan Berita Online

Kawilarang, Renne R.A. 2020. Bhutan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Apa Sebabnya?. https://www.viva.co.id/amp/berita/dunia/1331611-bhutan-buka-hubungan-diplomatik-dengan-israel-apa-sebabnya?page=all&utm_medium=all-page%20 . Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

Kuenselonline.com, (2020, 14 Desember). *Bhutan and Israel establish diplomatic ties*, Diakses dari <https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish-diplomatic-ties/>, pada tanggal 6 Februari 2022

Lamsang. T., *Bhutan to face Security and Monitoring issues with new Entry points and SDF exempt Dzongkhags*, diakses dari <https://thebhutanese.bt/bhutan-to-face-security-and-monitoring-issues-with-new-entry-points-and-sdf-exempt-dzongkhags> , pada tanggal 27 Januari 2022.

Pant, H. V., & Aditya, G. S., *Threat and Perceptions in the Himalayas: The complexity of Bhutan*, diakses dari <https://www.orfonline.org/research/the-complexity-of-bhutan> , pada tanggal 27 Januari 2022.

National security Bhutan, diakses dari <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-1516.html> , pada tanggal 27 Januari 2022.

Choden, Y., *Bhutan to have a cyber security strategy*, Bhutan Today, diakses dari <http://www.bhutantoday.bt/bhutan-to-have-a-cyber-security-strategy/> , pada tanggal 30 januari 2022.

What we learned while developing Bhutan's first National Cybersecurity Strategy, The UN specialized agency for ICTs, 5 November 2020, diakses dari <https://www.itu.int/hub/2020/11/what-we-learned-while-developing-bhutans-first-national-cybersecurity-strategy/> , pada tanggal 29 januari 2022.

The Kingdom Of Bhutan Agriculture, diakses dari <https://sites.google.com/site/thekingdomofbhutan/agriculture> , pada tanggal 2 Maret 2022.

Agriculture in Bhutan, diakses dari <https://www.grida.no/resources/1733> , pada tanggal 2 Maret 2022.

Diakses dari <https://www.fao.org/3/V8380E/V8380E03.htm#TopOfPage> , pada tanggal 17 Maret 2022.

Diakses dari <https://reliefweb.int/report/bhutan/6-ways-bhutan-building-better-food-systems-farm-table>, pada tanggal 17 Maret 2022.

Pernyataan Ron Malka dubes Israel untuk India dalam siaran pers kuensel diakses dari <https://kuenselonline.com/bhutan-and-israel-establish-diplomatic-ties/> ,pada tanggal 6 februari 2020.